

PROSIDING
SEMINAR NASIONAL PARIWISATA
JEMBER, 29 AGUSTUS 2017

PARIWISATA DAN PEMBANGUNAN

TIM PENYUNTING:
CHANDRA EKO WAHYUDI UTOMO
PRAMESI LOKAPRASIDHA



Diterbitkan Oleh:
Program Studi Diploma III Usaha Perjalanan Wisata
FISIP UNIVERSITAS JEMBER

PARIWISATA DAN PEMBANGUNAN

Tim Penyunting:

Chandra Eko Wahyudi Utomo
Pramesi Lokaprasidha

Layout dan Cover Design: Chandra Eko Wahyudi Utomo

Cetakan pertama: Agustus 2017

Program Studi Diploma III Usaha Perjalanan Wisata
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

UPT Penerbitan Universitas Jember

2017

PARIWISATA DAN PEMBANGUNAN

Diterbitkan atas:

Kerja sama

Program Studi Diploma III Usaha Perjalanan Wisata
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
Anggota Himpunan Lembaga Pendidikan Tinggi Pariwisata Indonesia (HILDIKTIPARI)

Dan UPT Penerbitan Universitas Jember

Hak Cipta @ 2017

ISBN : 978-602-61803-5-3

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang. Dilarang memperbanyak tanpa ijin tertulis dari penerbit, sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun, baik cetak, *photoprint* maupun *microfilm*.

PANITIA

**PROSIDING SEMINAR NASIONAL PARIWISATA 2017
PARIWISATA DAN PEMBANGUNAN**

Program Studi DIII Usaha Perjalanan Wisata Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

1. Penanggung jawab : Dr. Ardiyanto, M.Si.
2. Ketua : Dra. Sri Wahjuni, M.Si
3. Sekretaris : Rebecha Prananta, S.Si, M.Si
4. Moderator : Dr. Edy Wahyudi, S.Sos.
Drs. Himawan Bayu Patriadi, M.A., Ph.D.
5. Anggota : Pramesi Lokaprasidha, S.S., M.Par.
Panca Oktawirani, S.Si, S.Pd, M.Si
Indra Perdana Wibisono, S.ST, M.M.
Margaretta Andini Nugroho, S.ST.Par., M.Par.
Taufik Hendratno
Agung Prasetyo, S.Sos.
Dewi Nurlayli
Mulyadi

KATA PENGANTAR

Pariwisata kini telah menjadi mesin pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut dikarenakan pariwisata adalah industri besar yang berkembang dan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang mampu menciptakan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja secara luas. Pada tahun 2012 oleh WTO dicatat lebih dari 1,5 miliar wisatawan mengunjungi berbagai objek wisata di seluruh penjuru dunia, dengan pengeluaran lebih dari 800 juta US\$, dan mampu menciptakan lebih dari 195 juta kesempatan kerja. Sedangkan *United Nations World Tourism Organization (UNWTO)* memperkirakan pada tahun 2020 akan terjadi pergerakan sebanyak 1,6 miliar wisatawan mengunjungi objek-objek wisata di dunia dengan perkiraan membelanjakan uang lebih dari USD 5 miliar per hari.

Pariwisata telah diproyeksikan menjadi kekuatan baru yang mampu mendorong laju pertumbuhan perekonomian. Bagi Indonesia, pada era otonomi daerah, pariwisata diharapkan dapat mendorong pertumbuhan sektor lain dengan memperluas kesempatan kerja, dan usaha khususnya pada industri kreatif. Berkaitan dengan harapan dan, kondisi realita bahwa Indonesia memiliki berbagai atraksi wisata yang berada di berbagai wilayah, konsekuensinya adalah bahwa kebijakan pengembangan pariwisata harus berbasis pada keinginan masyarakat, khususnya masyarakat setempat. Pemikiran tersebut memunculkan konsep pembangunan masyarakat berbasis pariwisata yang merupakan salah satu pilihan bagi Indonesia untuk melibatkan masyarakat setempat dalam pembangunan dan mengatur dinamika kepariwisataan secara kreatif.

Bagi Indonesia pariwisata kini dijadikan sektor unggulan dalam mendorong laju pertumbuhan perekonomian. Pemerintah Indonesia telah menganggarkan dana besar dalam pembangunan kepariwisataan, dengan harapan agar sektor pariwisata dapat menjadi pemicu kegiatan perekonomian di seluruh wilayah. Gagasan tersebut menggembirakan, tetapi perlu dikritisi karena pembangunan kepariwisataan memerlukan sumberdaya manusia profesional khususnya di industri yang mengandalkan keramahtamahan. Pada kenyataannya, informasi dari berbagai sumber menggambarkan bahwa sumberdaya manusia di bidang pariwisata yang profesional yang dimiliki Indonesia masih kurang, sehingga dikhawatirkan program pembangunan kepariwisataan belum bisa maksimal. Hal tersebut dikarenakan lembaga pendidikan bidang pariwisata di Indonesia masih belum banyak. Diharapkan anggaran yang besar juga bisa mendukung didirikannya lembaga-lembaga pendidikan profesi kepariwisataan untuk memenuhi kebutuhan tenaga profesional baik di bidang praktis maupun akademis dalam upaya memberdayakan masyarakat lokal.

Keterlibatan masyarakat lokal di mana daya tarik wisata atau bidang pembangunan apa pun merupakan bagian penting yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional. Dasar dari pembangunan kapasitas masyarakat adalah melalui pendidikan dan pelatihan-pelatihan praktis yang mencakup pengetahuan

umum kepariwisataan, teknis di bidangnya, bahasa dan etika. Pemerintah, lembaga pendidikan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan pengusaha merupakan aktor-aktor yang harus menjadi tulang punggung pemberdayaan masyarakat lokal.

Sue Beeton (2006) mengatakan bahwa pembangunan masyarakat dan pariwisata adalah membangun kapasitas dari masyarakat untuk mencapai tujuan besar yang mereka kehendaki, dan sebagai bagian dari kemitraan antara pengembangan masyarakat lokal dan skema pendanaan oleh pemerintahan lokal dan sumber-sumber publik lainnya. Hal tersebut juga bisa digunakan pada hubungan sektor lain, seperti membangun kapasitas otoritas lokal untuk melibatkan kapasitas masyarakat lokal dalam melayani kebutuhan/keinginan para wisatawan. Menurut Balint: 2006 (dalam Moscardo: 2008) kapasitas masyarakat dalam kaitan dengan kepariwisataan menunjuk pada tingkat kompetensi, kemampuan dan ketrampilan yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan yang relevan. Sedangkan Moscardo (2008) mengatakan bahwa pembangunan kapasitas masyarakat merupakan sebuah tantangan untuk pengembangan pariwisata. Pembangunan kapasitas masyarakat adalah untuk memperbaiki proses pengembangan pariwisata dan meningkatkan keuntungan-keuntungan destinasi yang dikembangkan.

Jika ditinjau dari pembangunan ekonomi kerakyatan, maka inovasi dan kreativitas memiliki bidang yang luas yang mampu mendorong pengembangan industri kreatif yang dikelola oleh usaha berskala kecil menengah—wisata kreatif. Poerwanto (2017) mengatakan bahwa wisata kreatif dinilai dapat memberikan berbagai keuntungan dan keunggulan dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata yang dapat mendukung tercapainya tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals*) dengan menciptakan sumber-sumber terbarukan yang dapat mendorong daya kreasi masyarakat, penciptaan lapangan kerja dan usaha baru, serta kontribusi dalam pembangunan berkelanjutan. Wisata kreatif berbasis kerajinan harus komunikatif.

Berangkat dari pemikiran pengembangan wisata kreatif yang banyak dikerjakan oleh wirausahawan tingkat kecil menengah dan mulai tersebar di nusantara, maka konsekuensi logisnya adalah para pemangku kepentingan kepariwisataan mendorong tumbuhnya *creativepreneur* dan *tourismpreneur* sebagai alat memberdayakan masyarakat setempat untuk berusaha dalam bidang pariwisata.

Buku Pariwisata dan Pembangunan merupakan kumpulan pemikiran dari para akademisi yang berdasarkan pada kajian teoritis dan lapangan. Pemikiran-pemikiran tersebut bertujuan untuk memberi masukan bagi para pengambil kebijakan dan para pelaku bisnis kepariwisataan dalam menghadapi persaingan dan tuntutan global di bidang industri jasa. Pembangunan dan pengembangan kepariwisataan kini dihadapkan pada kemajuan teknologi komunikasi informasi, di mana hampir kegiatan perekonomian dan sosial dapat terinformasikan dengan cepat. Konsekuensinya, diperlukan inovasi dan kreativitas yang menjadi dasar dari pengelolaan kegiatan kepariwisataan.

DAFTAR ISI

Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Objek Wisata Air Terjun Selendang Arum Songgon Banyuwangi (Adetiya Prananda Putra, Fitri Amalia, Tantri Wijayanti, Jimmi Sandi Prasetyo)	1
Potensi Pengembangan Seni Pertunjukan Tradisional Jawa sebagai Bagian dari <i>Cultural Heritage Tourism</i> di Yogyakarta (Adhiningasih Prabhawati)	18
Gastrodiplomasi: Menguatkan Cita Rasa Pariwisata Indonesia (Agus Trihartono, Sefty Rihandini)	36
<i>SIP (Site Plan, Pine Tree Planting)</i> sebagai Upaya Revitalisasi <i>Brand Image</i> “Eco-Wisata” Watu Ulo (Alvino A, Scherrygo Agung R D, Lucky F, Rizka N, Amalia A)	47
Implementasi <i>Sentiment Analysis</i> Berdasarkan Media Sosial dalam Upaya Pengembangan Industri Pariwisata (Chandra Eko Wahyudi Utomo)	62
Strategi Penerapan Konsep VRIN dan Orientasi Kewirausahaan dalam Pengembangan Operasi Bisnis Pariwisata (Djoko Poernomo, Suhartono)	74
Implementasi Kebijakan Kebersihan terhadap Perilaku Wisatawan di Destinasi Wisata (Firman Syah, Bobby Bharata, Herlina, Pena Ilpia)	86
Strategi Pengembangan ‘Kawah Wurung’ sebagai Tapak Desa Wisata di Desa Kalianyar Kabupaten Bondowoso (Juhanda, Hadi Jatmiko)	100
Strategi Penguatan Brand Pandalungan sebagai Identitas Pariwisata Jember dengan Pendekatan Bauran Pemasaran (Kristian Suhartadi Widi Nugraha)	122
Inovasi Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dalam Pengembangan Potensi Pariwisata desa Jumerto kecamatan Patrang kabupaten Jember (Margaretta Andini Nugroho)	139
Strategi Pengembangan Jalur Transportasi Laut sebagai Akses Wisata Pesisir di kabupaten Banyuwangi (Masetya Mukti, Tantri Wijayanti)	151
Strategi Masyarakat Lokal dalam Mewujudkan <i>Community Based Tourism</i> pada desa Kemiren Banyuwangi (Moh. Andry F, Raudlatul Jannah)	163
Pengaruh Biaya Promosi terhadap Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Objek dan Daya Tarik Wisata Kota Makassar Sulawesi Selatan (Nasrullah)	175
Strategi Kebijakan Pengembangan Pariwisata: Studi Kasus di kabupaten Banyuwangi Jawa Timur (Nian Riawati)	201
Pariwisata Berbasis Komunitas Lokal (Strategi Pengembangan Pariwisata Pedesaan Berbasis Komunitas di kabupaten Sleman Yogyakarta) (Okta Hadi Nurcahyono)	213

Banyuwangi Festival: <i>Re-Branding</i> Banyuwangi dari ‘Kota Santet’ Menuju Destinasi Wisata Dunia (Puji Wahono, Supriyadi)	226
‘ <i>Plantation Tour Model</i> ’: Peningkatan Kunjungan Wisata Berbasis Kebun Kopi Di Wilayah Jember dan Banyuwangi (Purwowibowo, Sri Wahjuni)	246
Prospek Pengembangan Wisata Halal di Provinsi Sumatera Barat (Rebecha Prananta, Pramesi Lokaprasidha)	261
<i>BTE (Basic Life Support, Tas Siaga Bencana, English Conversation Training)</i> : sebagai Upaya Peningkatan Potensi Masyarakat dalam Pengembangan Wisata Watu Ulo (Risyda Z.H, Wasilah, Yudhistira M.K, Mega S.P, Kunti Dhorifah)	273
Pengembangan Air Terjun Dlundung untuk Menjadi Destinasi Pariwisata Unggulan di kabupaten Mojokerto (Rudi Tri Handoko, Aditya Wiralatief Sanjaya)	289
Strategi Peningkatan Kemampuan Komunikasi Humanis bagi Pemandu Wisata (Selfi Budi Helpiastuti)	306
Pendekatan <i>Community Building</i> dalam Pengembangan Desa Wisata: Studi Kasus Gunungkidul di Yogyakarta (Sunardi Purwaatmoko, Abubakar Eby Hara, Adhiningasih Prabhawati)	317
Pengaruh <i>Reward</i> dan <i>Punishment</i> Serta Rotasi Pekerjaan terhadap Motivasi Kerja untuk Meningkatkan Kinerja Karyawan Hotel di Jember (Syah Riza Octavy Sandy, Faozen)	332
Pelayanan Prima Sumberdaya Manusia Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Makassar (Usman Rendra)	332
Analisis Potensi Pajak Restoran di kabupaten Banyuwangi (Studi Kasus Kecamatan Banyuwangi (Yeni Puspita, Galih Wicaksono)	356
Konseptualisasi Akuntansi Budaya (Zarah Puspitaningtyas)	398

PENDEKATAN *COMMUNITY BUILDING* DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA: STUDI KASUS GUNUNGKIDUL DI YOGYAKARTA¹

Sunardi Purwaatmoko², Abubakar Eby Hara², Adhiningasih Prabhawati²
sunardiatmk@yahoo.com

Abstract

The main purpose of this paper is to try to see how far the local community succeeded in developing their capacity in tourism in Gunungkidul. Using the community building approach, we analyze how far the capacity building of local communities has been done. The measure of community capacity used in this paper is community leadership, community participation, community structure, skills and knowledge, mobilization resources and community strength that are the internal capacity dimensions of local communities and external capacities outside the community i.e. the government and the parties - other parties outside the government. In Gunungkidul, the capacity, role and participation of the community is done in the development and management of Tourism Villages. In the case of two Tourism Villages namely Nglanggeran Patuk, and Dewabejo Bejiharjo, the role of this community is a new feature of unique tourism development but quite successful. The development of the tourist village has been considered part of the principle of populist economy and quite successfully opened a new job land in Gunungkidul.

Keywords: *Capacity, community, tourism village, poverty, Gunungkidul*

Abstrak

Tujuan utama tulisan ini adalah mencoba melihat sejauh mana masyarakat lokal berhasil mengembangkan kapasitas mereka dalam pariwisata di Gunungkidul. Dengan menggunakan pendekatan *community building*, kami menganalisis seberapa jauh pembangunan kapasitas masyarakat lokal itu telah dilakukan. Ukuran kapasitas masyarakat yang dipakai dalam *paper* ini adalah kepemimpinan komunitas, partisipasi komunitas, struktur masyarakat, *skill* dan pengetahuan, mobilisasi sumber-sumber dan kekuatan komunitas yang merupakan dimensi-dimensi kapasitas internal masyarakat lokal dan kapasitas eksternal yang berada di luar masyarakat tersebut yakni pemerintah dan pihak-pihak lain di luar pemerintah. Di Gunungkidul, kapasitas, peran dan partisipasi masyarakat dilakukan dalam pengembangan dan pengelolaan Desa-desi Wisata. Dalam kasus dua Desa Wisata yaitu Nglanggeran Patuk, dan Dewabejo

¹ *Paper untuk disampaikan pada Seminar Nasional Pariwisata yang diselenggarakan oleh Program Diploma III Usaha Perjalanan Wisata Fisip Universitas Jember, 29 Agustus 2017.*

² *Dosen FISIP Universitas Jember*

Bejiharjo, peranan masyarakat ini menjadi ciri baru pengembangan wisata yang unik namun cukup berhasil. Pengembangan desa wisata telah dianggap bagian dari prinsip ekonomi kerakyatan dan cukup berhasil membuka lahan pekerjaan baru di Gunungkidul.

Kata Kunci: kapasitas, masyarakat, desa wisata, kemiskinan, Gunungkidul

Pendahuluan

Kabupaten Gunungkidul sering dikenal sebagai daerah yang kritis dari sisi pendapatan ekonomi. Sejak masa pemerintahan Orde Lama makanan pokok warga masyarakat Gunungkidul bukan beras seperti pada umumnya penduduk di Indonesia akan tetapi *thiwul* yang dibuat dari bahan dasar *gaplek*. *Gaplek* adalah ubi kayu yang dikeringkan. Pada masa-masa awal pemerintahan Orde Baru kondisi ekonomi pedesaan Gunungkidul sedikit mengalami perubahan. Dengan dimulainya proyek pembangunan REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun) yang menekankan pada industrialisasi yang berbasis pertanian, kondisi ekonomi masyarakat daerah Gunungkidul menjadi relatif semakin makmur. Makanan pokok yang berupa *thiwul* sedikit demi sedikit berganti karena program pembangunan pertanian di Indonesia pada masa pemerintahan Suharto telah berhasil mengubah kondisi perekonomian di pedesaan. Revolusi hijau yang digalakkan pemerintah melalui Peran sentral BULOG dan KUD telah mampu menjaga stabilitas harga beras secara lebih menguntungkan petani. Akan tetapi, walaupun proyek pembangunan masa Orde Baru telah mampu sedikit merubah kondisi ekonomi kabupaten Gunungkidul, pada umumnya masyarakat pedesaan masih tetap tertinggal. Hal ini disebabkan karena, golongan penduduk yang relatif lebih terdidik dan *trampil* cenderung berusaha untuk mencari penghidupan yang lebih layak ke daerah-daerah perkotaan, terutama Jakarta.

Keadaan demikian mengharuskan para pembuat keputusan untuk terus bafikir mencari jalan keluar. Setelah program otonomi daerah diterapkan, pencarian jalan keluar ini semakin terpicu karena daerah diberikan kesempatan pada daerah untuk mencari sumber pendapatan sendiri. Untuk daerah Gunungkidul yang gersang dan kurang subur, salah satu jalan untuk mengangkat kesejahteraan penduduk Gunungkidul adalah memfokuskan pada pengembangan daerah pada sektor pariwisata, karena potensi wilayah Gunungkidul sangat memungkinkan untuk dikembangkan menjadi obyek wisata. Di Gunungkidul terdapat banyak sekali daerah-daerah yang dapat dikembangkan menjadi obyek wisata yang menarik. Pada masa pemerintah Orde Baru yang terpusat, pemerintahan Suharto belum memperhatikan upaya untuk melakukan diversifikasi pengembangan wilayah yang serius guna untuk mengatasi keterbelakangan ekonomi daerah Gunungkidul yang umumnya daerah pedesaan yang

misikin walaupun potensi untuk pengembangan wilayah itu ada yakni, pariwisata. Potensi pengembangan obyek wisata di Gunungkidul berjumlah sangat banyak akan tetapi tidak dieksploitasi secara maksimal. Obyek-obyek wisata seperti Pantai Baron, Kukub, dan Krakal, dan beberapa daerah lain sudah mulai dikembangkan tetapi jumlah kedatangan wisatawan dari tahun 1993 sampai dengan 2007 masih terbatas dan mengalami pasang surut seperti pada tabel berikut.

Tabel 1. Data Jumlah Kunjungan Wisatawan di kabupaten Gunungkidul Tahun 1993/1994 s/d 2007

NO	TAHUN ANGGARAN	JUMLAH BULAN	WISATAWAN			
			MANCANEGARA	NUSANTARA	JUMLAH	RATA-RATA PER BULAN
1	1993/1994	12	393	178.000	179.354	14.946
2	1994/1995	12	451	221.975	222.426	18.536
3	1995/1996	12	457	301.208	301.665	25.139
4	1996/1997	12	468	305.836	306.304	25.525
5	1997/1998	12	477	310.490	310.967	25.914
6	1998/1999	12	453	300.394	300.847	25.071
7	1999/2000	12	449	326.364	326.813	27.234
8	2000*	9	324	278.998	279.322	31.036
9	2001	12	573	342.570	343.143	28.595
10	2002	12	667	332.514	333.183	27.765
11	2003	12	733	348.684	349.417	29.118
12	2004	12	533	352.599	353.132	29.498
13	2005	12	320	325.157	325.477	27.123
14	2006	12	125	209.450	209.450	17.466
15	2007**	11	109	287.827	287.936	26.176

* : Bulan April s/d Desember

** : Bulan Januari s/d Desember

Sumber data : Dinas Pariwisata & Kebudayaan Kabupaten Gunungkidul

Pengembangan sektor pariwisata mulai ditangani secara lebih baik oleh pemerintah beberapa tahun setelah otonomi diberlakukan terutama setelah tahun 2011. Program otonomi telah memaksa para pembuat keputusan untuk kreatif memajukan daerahnya yang terbelakang. Daerah-daerah tujuan wisata baru telah dikembangkan secara terus menerus sehingga telah menambah daftar obyek wisata yang semakin bervariasi. Pantai Baron, Kukub, Krakal, Lawang, dan Sundak yang masih tetap menjadi daerah tujuan wisata yang penting. Daerah-daerah wisata pantai baru telah dikembangkan di daerah-daerah lain seperti Indrayanti, Gnrehan, Gnobaran, pantai Siung Pulang Sawal, Jungwok dan lain-lain. Pengembangan obyek wisata tidak hanya menfokuskan daerah wisata pantai akan tetapi juga obyek daerah wisata yang lain seperti Goa Pindul, Gunung Api Purba Gnlanggeran, Kali Suci, Air Terjun Sri Gethuk, Luweng Cokro, Goa Jomblang, dan lain-lain. Dengan demikian strategi pengembangan

daerah tujuan wisata di Gunungkidul telah dilakukan secara lebih baik mulai tahun 2011 (data tahun 2008, 2009, 2010 tidak dijumpai). Sebagai akibatnya, daya tarik obyek wisata di daerah itu menjadi semakin meningkat. Dengan adanya pengembangan obyek-obyek wisata baru ini jumlah kedatangan wisatawan ke Gunungkidul meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah kedatangan wisatawan yang semakin meningkat. Sebagai gambaran, jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2011 rata-rata baru mencapai jumlah 615.397 orang, akan tetapi pada tahun 2012, 2013, dan 2014 meningkat menjadi lebih dari dua kali lipat, secara bergantian 1.000.387, 1.337.438, 1.955.817. Pada tahun 2015 jumlah kunjungan wisatawan terus meningkat dari tahun sebelumnya, 2.642.759.

Tabel 2. Data Jumlah Kunjungan Wisatawan di kabupaten Gunungkidul Tahun 2011 s/d 2015

NO	TAHUN ANGGARAN	JUMLAH BULAN	WISATAWAN		
			MANCA NEGARA	NUSANTARA	JUMLAH
1	2011	1	1.299	615.397	6
2	2012	1	1.800	998.587	1
3	2013	1	3.751	1.333.687	1
4	2014	1	3.060	1.952.747	1
5	2015	1	4.125	2.638.634	2

Sumber data: Dinas Pariwisata & Kebudayaan Kabupaten Gunungkidul

Kalau dibandingkan kedua table di atas, table terakhir menunjukkan kemajuan yang pesat dalam kunjungan wisatawan hampir 10 kali daripada sepuluh tahun sebelumnya. Fenomena yang mencolok ini sungguh menarik perhatian. Gunungkidul saat ini menjadi salah satu tujuan wisata yang cukup terkenal dengan jumlah wisatawan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Dengan pengembangan wisata ini citra Gunungkidul sebagai daerah miskin, gersang dan makan thiwul mulai dilupakan dan digantikan dengan citra daerah kunjungan wisata yang bagus. Melihat kondisi daerah ini yang miskin, kering dan tanpa sumber alam yang memadai serta PAD yang tidak terlalu besar, maka pengembangan wisata yang sangat pesat ini semakin menarik perhatian. Kemampuan pemerintah untuk mengembangkan wisata dalam kondisi demikian tentu lah sangat terbatas. Dengan latar belakang demikian, paper ini karena itu mencoba melihat faktor apa yang signifikan dalam proses pengembangan ini. Salah satu yang diperkirakan berperan besar dalam proses ini adalah partisipasi masyarakat baik dalam pengelolaan maupun pengembangan daerah tujuan wisata.

Permasalahan dan Urgensi Paper

Permasalahan utama paper ini adalah sejauh mana pembangunan kapasitas masyarakat lokal berperan terhadap pengembangan dan pengelolaan Gunungkidul sebagai daerah tujuan wisata. Pendekatan pembangunan masyarakat (*community building approach*) diperlukan di masyarakat lokal di Gunungkidul. Selain itu, perlu

membangun kapasitas masyarakat untuk mencapai tujuan-tujuan kolektif agar dapat memanfaatkan peluang bisnis sebagai akibat dari peningkatan jumlah kedatangan wisatawan. Pada akhirnya masyarakat di sekitar daerah wisata tersebut bisa mendapatkan manfaat yang signifikan yaitu bisa sejahtera dan destinasi-destinasi wisata juga semakin maju serta berkembang secara signifikan pula di Gunungkidul.

Pendekatan *Community Building* dalam Pariwisata

Tidak diragukan lagi bahwa pembangunan dalam bidang pariwisata mempunyai pengaruh yang besar terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi bagi penduduk masyarakat lokal. Walaupun demikian, dampak positif ini tidak akan dapat terwujud apabila masyarakat lokal tidak mempunyai kemampuan untuk membangun kapasitas modal sosial yang dimiliki. Untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan turisme, konsep masyarakat harus dipahami sebagai jaringan potensial dari individu-individu, kelompok-kelompok dan organisasi-organisasi yang bekerjasama atau mempunyai potensi untuk bekerjasama dalam memecahkan masalah dan mencapai kepentingan dan tujuan yang sama.

Dalam pembangunan sector pariwisata, tingkat kapasitas masyarakat yang menduduki wilayah tujuan wisata tersebut menjadi faktor penting dalam mencapai keberhasilan dalam pembangunan. Keberhasilan pembangunan pariwisata menghendaki semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) memahami bahwa investasi pemberdayaan masyarakat sangat diperlukan dalam pembangunan pariwisata. Tanpa pembangunan masyarakat, kapasitas untuk melaksanakan program-program pariwisata akan menjadi sangat terbatas dan proses pembangunan pariwisata tidak akan dapat berjalan (Aref et. al., 2009: 24).

Konsep pembangunan masyarakat berhubungan dengan partisipasi, pemberdayaan (*empowerment*) dan kapasitas masyarakat. Pembangunan masyarakat dapat dilihat sebagai proses pembentukan modal sosial (*social capital*) yang diperlukan untuk mencapai tujuan kolektif. Pembangunan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Dalam pembangunan masyarakat perlu ditekankan bahwa masyarakat harus dilihat sebagai sebuah sistem sosial yang terikat oleh lokasi geografis atau kepentingan bersama (*common interest*) (Aref et. al., 2010a). Dalam hal ini pembangunan kapasitas masyarakat (CCB=*Community Capacity Building*) menjadi prasyarat untuk memperbaiki proses pembangunan sektor turisme dan meningkatkan keuntungan yang dihasilkan untuk masyarakat lokal.

Dalam meningkatkan kapasitas masyarakat, terdapat dua hal yang sangat penting untuk dipertimbangkan. Pada tingkat organisasional, upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dapat diwujudkan dengan cara mengembangkan kemampuan organisasi-organisasi masyarakat. Sedangkan pada level komunitas, perlu memfokuskan perhatian pada asosiasi-asosiasi dan hubungan antara penduduk, kelompok-kelompok

masyarakat lokal dan organisasi-organisasi masyarakat lokal untuk membangun masyarakat yang bersangkutan. Kapasitas masyarakat dapat diukur melalui kemampuannya dalam memobilisasi, mengidentifikasi dan memecahkan berbagai persoalan. Kapasitas masyarakat adalah interaksi antara modal-modal yang dimiliki masyarakat, dan sumber-sumber organisasional yang ada dalam masyarakat tersebut yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah-masalah kolektif dan memperbaiki masyarakat itu (Aref et. al., 2010a). Dengan demikian konsep pembangunan kapasitas komunitas (CCB) dianggap sebagai kemampuan penduduk dan komunitas untuk melaksanakan pekerjaan. Kemampuan penduduk dan komunitas itu berhubungan dengan faktor-faktor dan indikator-indikator penentu dalam konteks kondisi sosial-ekonomi dan lingkungan. Seluruh bagian dari komunitas itu terlibat dalam pembangunan kapasitas masyarakat.

Dimensi-dimensi dari kapasitas masyarakat yang paling penting dan diperlukan untuk mencapai perubahan sistimatis di dalam komunitas lokal adalah: partisipasi dan kepemimpinan, sumber-sumber yang ada dalam masyarakat, jaringan sosial dan kekuatan yang dimiliki masyarakat. Secara kolektif keempat dimensi kapasitas masyarakat itu merupakan modal sosial (*social capital*) yang melekat dalam masyarakat itu (Aref et. al., 2009). Sedangkan menurut Aref et. al. (2009) terdapat terdapat tujuh dimensi yang dapat digunakan untuk mengukur kapasitas masyarakat yakni, kepemimpinan komunitas, partisipasi komunitas, struktur masyarakat, bantuan dari luar, skill dan pengetahuan, mobilisasi sumber-sumber dan kekuatan komunitas.

Hasil penelitian yang menggunakan pendekatan pembangunan kapasitas masyarakat menunjukkan kesimpulan yang bervariasi. Akan tetapi pada umumnya temuan-temuan penelitian itu menjelaskan bahwa keberadaan partisipasi masyarakat dan kepemimpinan, sumber-sumber yang dimiliki, jaringan sosial dan kekuatan yang dimiliki komunitas berpengaruh positif terhadap pembangunan sektor *tourisme*. Apabila elemen-elemen itu dimanfaatkan secara maksimal dan mendapat dukungan dari pemerintah sebagai *leading sector* maka untuk mencapai kesuksesan dalam pembangunan sektor wisata tidak akan mendapatkan halangan yang berarti.

Pembangunan kapasitas masyarakat bersifat esensial dalam pembangunan sektor *tourisme*. Walaupun demikian, terdapat beberapa halangan dalam mencapai pembangunan kapasitas masyarakat (Aref et. al., 2009). Hunt (2005), menjelaskan beberapa halangan untuk mewujudkan pembangunan kapasitas masyarakat, yakni: 1) masyarakat kurang dapat berpartisipasi dalam kebijakan-kebijakan pembangunan *tourisme*, 2) ketidakseimbangan kekuatan antara pemerintah dengan masyarakat lokal, 3) keterbatasan pengetahuan tentang *tourisme*, 4) program-program pembiayaan jangka pendek. Berbeda dengan hasil survey Hunt, *the Social Policy Unit of the Western Australian Government* (2004), menjelaskan beberapa halangan itu meliputi

ketersediaan waktu yang terbatas, skill, keterbatasan dana, kemampuan individu dan kelompok untuk berkerjasama, kejarangan para praktisi ahli di bidang turisme (Social Policy Unit 2004). Untuk memecahkan persoalan ini meningkatkan pengetahuan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan tourism bersifat fundamental (Aref et. al.,2009).

Beberapa kasus lain yang terjadi di beberapa negara menyajikan beberapa analisis dengan temuan yang berbeda-beda baik negatif maupun positif. Mbaiwa et. al. (2011) , dalam tulisannya yang menganalisis tentang dampak penerapan Manajemen Sumber Alam Berbasis-Komunitas terhadap tingkah laku penduduk dalam menghadapi pembangunan sektor wisata dan konservasi di delta Sungai Okavango, Bostwana menjelaskan bahwa tingkah laku penduduk negatif setempat terhadap konservasi mempunyai hubungan yang erat dengan kemerosotan sumber-sumber di negara-negara berkembang. Hasil penelitian menunjukkan perubahan tingkah laku penduduk baik yang bersifat positif maupun negatif terhadap pembangunan pariwisata dan konservasi. Perubahan tingkah laku itu dipicu oleh keuntungan ekonomi yang diperoleh masyarakat setempat sebagai akibat dari penerapan sistim Manajemen Sumber Alam Berbasis-Komunitas, yakni menjadi co-management dalam manajemen sumber-sumber; dan tindakan kolektif masyarakat lokal dalam yang mana sistim Manajemen Sumber Alam Berbasis-Komunitas diadopsi. Sebagai akibatnya, pengambil keputusan dari sektor publik harus memberikan proiritas utama pada penerapan Sistem Manajemen Sumber Alam Berbasis-Komunitas dan menggunakannya sebagai alat untuk mencapai tujuan konservasi (Mbaiwa et. al. 2011).

Dalam studi kasus yang pertama di Turki, Tosun (2004) menjelaskan tingkah laku kelompok- kelompok kepentingan. Tujuan utama dari studi ini adalah untuk menganalisis jenis atau tipe partisipasi masyarakat yang diharapkan oleh berbagai kelompok kepentingan di Turki. Dalam analisisnya Tosun menemukan bahwa kelompok-kelompok kepentingan yang beraneka ragam mengharapkan berbagai tipe partisipasi masyarakat yang berbeda untuk mendapatkan tujuan-tujuan mereka sendiri yang bertentangan antara yang satu dengan yang lain (Tosun, 2004).

Dalam studi yang kedua, Tosun menjelaskan beberapa tahap munculnya partisipasi masyarakat di bawah kondisi politik, sosial-ekonomi dan budaya dengan tidak mengabaikan daerah-daerah pinggiran yang ada di negara-negara maju. Tosun (2005) menjelaskan bahwa proses munculnya partisipasi masyarakat disebabkan oleh tiga peristiwa: (1) ancaman eksternal dan internal terhadap pemerintah pusat yang memaksa pemerintah harus menerima, mendukung dan memfasilitasi implementasi pembangunan dengan menggunakan pendekatan pembangunan partisipasi masyarakat, (2) munculnya kemauan politik pada tingkat pusat, dan (3) kepatuhan terhadap aturan-aturan hukum, restrukturisasi sistim administrasi pada tingkat operasional dan proses partisipasi. Kesimpulan yan diambil dalam tulisan ini adalah bahwa kemauan politik

pada tingkat pusat, kepatuhan terhadap aturan-aturan hukum, dan pemberdayaan masyarakat lokal dan kejasama yang melibatkan kelompok- kelompok elit dominan bersifat essensial bagi kemunculan dan operasionalisasi menggunakan pendekatan pembangunan partisipasi masyarakat dalam pembangunan *tourisme* (Tosun 2005).

Studi Tosun yang pertama mengindikasikan bahwa tanpa keterlibatan pemerintah dalam sektor pariwisata yang akan terjadi adalah konflik antar kelompok kepentingan. Terbukti, dalam studi Tosun yang kedua partisipasi masyarakat dan kehadiran pemerintah untuk memfasilitasi implementasi pembangunan bersifat essensial bagi kemunculan dan operasionalisasi pendekatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan *tourisme*. Dari hasil penelitian Mbaiwa et. al. dan Tosun dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah dalam pembangunan kapasitas masyarakat bersifat sentral. Di Bostwana pemerintah harus mempertahankan penerapan Sistem Manajemen Sumber Alam Berbasis- Komunitas yang intinya bertujuan untuk menciptakan kolaborasi yang sinergis antara pemerintah dengan masyarakat lokal. Sedangkan penelitian Tosun menjelaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah dengan pemangku kepentingan sangat diperlukan. Terbukti ketika kolaborasi itu tidak terbentuk kelompok-kelompok kepentingan menjadi saling bertentangan.

Dipandang dari pendekatan *community building*, studi Shone (2008) yang menitik beratkan pada analisis perubahan implementasi kebijakan di New Zealand yang pro-kekuatan swasta yang terstruktur dalam ideologi neo-liberalisme menuju kebijakan yang lebih berpihak pada kepentingan rakyat semakin jelas menunjukkan bahwa kehadiran pemerintah sebagai dimensi kekuatan eksternal dalam pembangunan kapasitas masyarakat lokal pada sektor *tourisme* mempunyai kontribusi penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkesinambungan. Hal ini secara implisit mengindikasikan bahwa di New Zealand peranan kapasitas masyarakat lokal dalam sektor *tourisme* lebih kecil jika dibandingkan dengan peran pemerintah karena kapasitas internal masyarakat lokal tidak mampu secara mandiri menciptakan kesejahteraan masyarakat yang berkesinambungan.

Abdullah et. al. dalam penelitiannya tentang *Eco-Homestay* di desa Sidomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember menemukan bahwa *Eco-Homestay* dalam *tourisme* berbasis-konservasi di daerah pedesaan dapat dicapai karena komunitas penduduk Silo mampu mengendalikan struktur pembangunan yang terintegrasi, struktur organisasional, struktur finansial, strategi pemasaran, strategi operasional dan pembangunan fisik (Sidiq et. al., 2014). Nisa et, al. (2014) berusaha untuk mengidentifikasi potensi aktivitas petani organik sebagai ketertarikan obyek wisata *agroedutourism* di daerah Lawang, kabupaten Malang, Jawa Timur. Mereka menemukan bahwa pembangunan obyek wisata berbasis *agroedutourism* telah membawa manfaat pembelajaran antara petani dan murid dalam menciptakan aktivitas kewirausahaan yang dapat dilihat melalui pencapaian prestasi yang diperoleh oleh *ecopreneur* yang dapat diukur dari dimensi

sistim pasar yang efektif dan keuntungan riil yang dapat diperoleh dari upaya pengembangan *agro-ecosystem* yang sehat dan hasil-hasilnya. Kolaborasi antara petani dan murid sekolah dapat memperbaiki ketertarikan obyek wisata dan lama berkunjung bagi para wisatawan. Studi kasus lain yang terjadi di Indonesia adalah Bali. Sebagai tujuan wisata yang utama di Indonesia, Bali memiliki kemampuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakatnya yang diperoleh dari sektor *tourisme*, walaupun demikian, dalam pembangunan *tourisme* terdapat beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus yakni, kerusakan dalam bidang pertanian dan dampak negatif *tourisme* terhadap budaya masyarakat Bali. Penelitian ini menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat menjadi kunci utama untuk dalam membangun *tourisme* karena dengan pemberdayaan masyarakat dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan *tourisme*, masyarakat setempat dimana sektor *tourisme* dikembangkan mampu berpartisipasi dalam memecahkan masalah yang timbul di bidang budaya dan pertanian (Sutawa 2012). Keberhasilan obyek wisata di Sidomulyo dan Lawang dan Bali terkait dengan kapasitas masyarakat dalam mengembangkan obyek wisata, partisipasi masyarakat, kepemimpinan, dan sumber-sumber, jaringan sosial dan kekuatan yang dimiliki komunitas tersebut. Ketiga kasus itu menunjukkan bahwa peran masyarakat lokal menjadi faktor terpenting dalam memecahkan berbagai masalah yang muncul sebagai akibat dari pembangunan sektor wisata.

Kasus di Indonesia yang terakhir adalah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Rencana pengembangan warisan budaya di Yogyakarta mengintegrasikan aspek-aspek politik, teknokrasi, dan partisipasi masyarakat lokal. Dalam penelitian mereka yang berjudul “*Culture Development Planning in the Special Region of Yogyakarta (Management Planning of Cultural Heritage in Kotagede District based on Community Empowerment Conservation Model)*“, Suryanti et. al. menemukan bahwa terdapat proses yang unik yang melibatkan kombinasi kolaboratif antara aktor-aktor politik, teknokrat, dan partisipasi masyarakat lokal yang dianalisis dengan model pendekatan *participatory*, *top down* dan *bottom up* (Suryanti et.al 2014). Kontribusi yang berharga dalam penelitian ini adalah bahwa kolaborasi antara komunitas masyarakat lokal, pemerintah, dan *NGO (Non-Government Organnizations)* telah berhasil dalam mewujudkan rencana pembangunan obyek wisata warisan budaya di Yogyakarta.

Kesimpulan yang dapat diambil dari berbagai studi kasus itu adalah bahwa jika masyarakat lokal tidak mampu memanfaatkan modal sosial yang ada di dalam masyarakat itu sendiri maka kehadiran bantuan dari luar terutama pemerintah sangat diperlukan dalam upaya untuk membangun kapasitas masyarakat. Kasus yang terjadi di Bostwana dan Turki peranan bantuan dari luar bersifat sentral. Berbeda dengan kasus yang terjadi di kedua negara itu kasus yang terjadi di Lawang dan Silo, Propinsi Jawa Timur, dan Bali menunjukkan bahwa semua pengaku kepentingan di tingkat lokal berhasil melakukan kolaborasi dalam mengembangkan obyek *tourisme* sehingga tidak

perlu campur tangan pemerintah atau pihak lain. Sedangkan kasus di Yogyakarta kolaborasi antara komunitas masyarakat lokal, pemerintah, dan NGO (*Non-Governmental Organizations*) telah berhasil dalam melestarikan warisan budaya di Kotagedhe.

Dari sudut pandang pendekatan *community bulding*, pengembangan fisik obyek-obyek wisata berkaitan dengan unsur-unsur pengembangan kapasitas internal masyarakat lokal yang terdiri dari berbagai dimensi, yakni: kepemimpinan komunitas, partisipasi komunitas, struktur masyarakat, *skill* dan pengetahuan, mobilisasi sumber-sumber dan kekuatan komunitas. Gabungan antara kapasitas internal masyarakat lokal dengan kapasitas pemerintah dan kekuatan-kekuatan lain di luar pemerintah yang merupakan dimensi kapasitas eksternal, akan dapat memecahkan berbagai persoalan yang timbul sebagai akibat dari pembangunan sektor wisata sehingga akibatnya, dapat meningkatkan baik kesejahteraan ekonomi masyarakat lokal maupun pendapatan daerah. Pendeknya, kolaborasi antara masyarakat lokal dengan pemerintah dan pihak-pihak lain di luar pemerintah akan mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat lokal dan pendapatan asli daerah, dan sebaliknya.

***Community Building* dalam Pengembangan Desa Wisata di Gunungkidul**

Pembangunan kapasitas komunitas dan partisipasi masyarakat berperan penting dalam kemajuan pariwisata di Gunungkidul. Ada beberapa aspek yang akan dibahas di sini. Pertama adalah peranan pemerintah dan kemudian peran masyarakat.

Ide pengembangan pariwisata Gunungkidul tidak dapat dilepaskan dari keinginan para pemimpin dan masyarakat untuk keluar dari siklus kemiskinan karena keadaan sumber alam yang terbatas dan sumberdaya manusia yang lemah. Bila masyarakat hanya berharap dari kehidupan yang ada maka tidak akan ada kemajuan, kehidupan akan tetap sama. Sebelum ini terutama pada masa Orde Baru, pembangunan yang terpusat seringkali tidak memberikan peluang pada usaha-usaha lokal untuk maju dan berkembang. Ketika program otonomi daerah dimunculkan, harapan bagi pemerintah daerah untuk kreatif mencari jalan keluar dan mencari sumber-sumber pendapatan menjadi terbuka. Pariwisata kemudian menjadi salah satu pilihan. Yang menarik dari pengembangan wisata di Gunungkidul adalah pelibatan atau pengutamaan masyarakat local yang besar sementara peran investor dibatasi. Setelah melalui proses dan pembahasan yang terus menerus, pemerintah dan masyarakat menemukan *best practice* dan pola-pola pengembangan wisata yang dapat diuraikan berikut ini.

Pemerintah memang berperan dalam proses ini. Tetapi peran mereka sebatas memberi kerangka besar pengembangan daerah-daerah wisata, dalam bertukar ide dengan masyarakat, dalam melakukan pelatihan dalam rangka memperkaya pengetahuan dan membantu pembangunan fasilitas. Garis besar pengembangan pariwisata pemerintah Gunungkidul antara lain dapat dilihat dari RPJMD Tahun 2016-

2021 dengan visi: “Mewujudkan Gunungkidul sebagai Daerah Tujuan Wisata yang Terkemuka dan Berbudaya menuju masyarakat yang berdaya saing, maju, mandiri dan sejahtera tahun 2021”. Dalam hal pembangunan fasilitas, penekanan adalah pada infrastruktur pendukung seperti jembatan dan jalan. Kemudian pemerintah juga mendorong investasi dengan memberi suasana yang kondusif dengan membuat regulasi dan perizinan yang mudah. Pemerintah juga melakukan berbagai pelatihan untuk mengenalkan perlunya pariwisata yang menjaga lingkungan hidup dan sosial budaya. Perspektif lingkungan, sensitivitas terhadap bencana, gender dan kearifan lokal merupakan tema dalam berbagai pelatihan dan workshop yang melibatkan pemerintah.

Partisipasi dan pelibatan masyarakat dilakukan dengan konsep *Community Based Tourism* yang mengadopsi konsep *community building* di atas. Dalam kerangka konsep ini, salah satu kegiatan yang kini menonjol dan mendapat perhatian adalah pengembangan Desa Wisata. Di DI Yogyakarta, pengembangan desa wisata ini mulai digalakkan karena ia dipandang sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan. Di DIY, desa wisata yang sudah terdaftar di Dinas Pariwisata tersebar di lima kabupaten/kota yang semuanya berjumlah 122. Sebarannya adalah 38 desa wisata di Sleman, 14 desa wisata di Gunung Kidul, 27 di Kota Yogyakarta, 33 di Bantul, dan 10 di Kulon Progo. Desa Wisata ini sesuai dengan potensi wisatanya yaitu ada desa wisata alam, kerajinan, dan budaya lokal. Walaupun dalam prakteknya, kelompok-kelompok wisata ini menggabungkan berbagai potensi wisata.

Pelibatan masyarakat merupakan kata kunci dalam konsep ini. Ide bisa berasal dari pemerintah ataupun sekelompok masyarakat. Juga ada pengelola tempat-tempat wisata yang biasanya terdiri atas para pemimpin Kelompok Sadar Wisata dan mereka memiliki perencanaan yang lebih matang dan jelas. Namun proses selanjutnya banyak upaya dilakukan untuk melibatkan masyarakat mulai dari menciptakan dan menjual produk wisata. Untuk Gunungkidul, pariwisata merupakan terobosan baru untuk mengatasi siklus kemiskinan, karena itu lah masyarakat antusias untuk berpartisipasi, bergotong royong dan mereka memiliki forum seperti Forum Sadar Wisata, tempat mereka bermusyawarah dan menyampaikan aspirasi. Salah satu contohnya adalah dalam pengembangan desa wisata. Tentu saja ada pengembangan yang sukses dan yang belum berjalan sebagai mana mestinya.

Diantara desa wisata yang cukup berhasil adalah desa wisata Nglanggeran Patuk, dan Desa Wisata Dewabejo Desa Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo, Gunungkidul. Di Wisata Dewabejo terdapat wisata alam Goa Pindul, Goa Glatik, Monumen Panglima Jendral Sudirman serta legenda yang ada di Gedong, (legenda sendang tujuh, legenda Wali Aji, Sobatullah, dan Sepetaking). Keterlibatan warga hampir menyeluruh dalam hal ini mulai dari manajemen, pemandu, petugas parkir, penginapan seperti *homestay*, makanan sampai pada pengelolaan sampah. Mereka ini sering disebut dengan istilah ‘Wirawisata’ atau pejuang wisata yaitu orang yang mengelola sumber-sumber wisata

tadi. Ini berbeda dengan pengembangan wisata selama ini yang mengandalkan investasi dari pemodal besar dan dikelola oleh pegawai-pegawai yang direkrut melalui proses perusahaan.

Proses pelibatan masyarakat ini tentu saja tidak instan dan memakan waktu yang lama sejak tahun 1999 terutama untuk mengajak masyarakat agar ikut serta. Pada tahap awal organisasi kepemudaan seperti Karang Taruna yang awalnya ingin mengelola daerah untuk *hiking* dan *tracking* di gunung yang biasa dikunjungi oleh orang luar. Di desa Dewabejo obyek-obyek wisata utama seperti Goa Pindul dan Kali Oyo sebelumnya juga telah dikunjungi untuk olahraga *cavetubing* dan *tube rafting*. Pengembangan Desa Wisata Dewa Bejo lebih lambat yakni baru dimulai tahun 2010. Di desa wisata Nglanggeran Patuk, para wirawisata membentuk forum yang bernama Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) yang terdiri dari unsur Karang Taruna Bukit Putra Mandiri, Pemerintah Desa, kelompok tani, ibu-ibu PKK, dan pemilik rumah singgah (*homestay*). Melalui forum ini lah komunikasi yang equal, partisipatif dan horizontal dilakukan, sehingga banyak persoalan dapat diatasi dengan baik (Hastosaptyadhan 2016). Pola yang sama juga terjadi di Desa Wisata Dewa Bejo yang membentuk Pokdarwis Dewabejo. Para wirawisata ini mempunyai visi yang sama untuk kemajuan dan mencari informasi dan ilmu yang berguna untuk mengembangkan daerah wisata mereka. Mereka juga melakukan usaha memberdayakan masyarakat melalui pendidikan manajemen organisasi, pelatihan Standart Operating Procedure, pelatihan kesehatan dan keselamatan kerja, pelatihan bahasa Inggris, bahasa Indonesia, pelatihan kependamuan, pelatihan pengenalan batu karst, dan pelatihan tata ruang yang baik.

Di desa wisata Nglanggeran, lahan di seputar gunung api purba itu kemudian dijadikan wilayah konservasi sehingga lingkungan alamnya tertata dengan baik dan lebih asri. Usaha yang keras ini memberikan hasil yang dapat dinikmati sekarang oleh masyarakat. Bahkan Wisata Gunung Api Purba Nglanggeran di daerah ini menjadi desa wisata terbaik di Indonesia tahun 2013. Kemudian menjadi kandidat untuk memenangkan juara kategori *Innovation in Non-Governmental Organization* dalam ajang UNWTO (*United Nations World Tourism Organization*) PBB. Pada tahun 2017 Desa Widata ini mendapat penghargaan sebagai Desa Wisata Terbaik I Indonesia dari ASEAN *Community-based Tourism (CBT) Award 2017*, di Singapura pada 20 Januari 2017.

Pencapaian ini dinilai berdasarkan pada keberhasilan memberi sumbangan bagi kesejahteraan social, pelibatan rakyat dalam kepengurusan dan pemeliharaan lingkungan hidup, partisipasi yang melibatkan interaksi antara masyarakat dengan wisatawan melalui penyediaan pelayanan, pramuwisata, termasuk juga dalam memberikan pelayanan berkualitas dalam makanan, minuman, akomodasi dan kinerja friendly tour operator(FTO).

Selain itu masyarakat juga melestarikan budaya local yang selama ini terseok-

seok dengan menjadikannya bagian wisata. Misalnya desa wisata Nglanggeran Patuk upacara kirab tahunan bersih desa atau rasulan menjadi momen dimana ditambahkan berbagai kegiatan kesenian tradisional mulai dari jathilan, tarian anak-anak, gejhog lesung, sholawatan, tayub dan bahkan kirab gunung hasil pertanian yang nanti akan diperebutkan warga dan wisatawan. Keunikan budaya demikian menjadi daya tarik dan atraksi wisata. Sedangkan Desa Wisata Dewabejo adalah juga desa budaya yang memiliki kesenian berupa musik gejhog lesung (atraksi para perempuan memukul lesung dengan alu beramai-ramai), permainan egrang, cokekan, reog, doger, sinden dan gamelan, wayang kulit, dan wayang beber.

Kesimpulan

Dalam tulisan ini kami telah menunjukkan bahwa pengembangan desa wisata memberi kontribusi sangat besar bagi ekonomi kerakyatan untuk mengatasi siklus pengangguran dan kemiskinan di Gunungkidul. Masyarakat sangat ingin keluar dari kemiskinan dengan menunjukkan semangat gotong royong, partisipasi dan kerjasama dalam kelompok-kelompok sadar wisata. Mereka juga terlibat mulai dari perencanaan, pengelolaan dan pelayanan wisata. Pengembangan desa wisata ini telah dicatat sebagai model sendiri oleh dunia internasional dan lebih penting lagi telah meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Gunungkidul. Dalam konteks itu pemerintah diharapkan memberi perhatian lebih besar untuk memfasilitasi proses ini. Masyarakat lokal diharapkan mampu mengembangkan dimensi-dimensi kapasitas masyarakat yang lain seperti skill dan pengetahuan, mobilisasi sumber-sumber dan kekuatan yang dimiliki komunitas. Untuk mencapai keberhasilan pembangunan lembaga-lembaga sosial masyarakat lokal memerlukan bantuan pemerintah lokal dan pihak-pihak lain yang merupakan dimensi eksternal dari kapasitas masyarakat lokal. Gabungan antara kapasitas internal masyarakat lokal dengan kapasitas pemerintah dan kekuatan-kekuatan lain di luar pemerintah yang merupakan dimensi kapasitas eksternal, akan dapat memecahkan berbagai persoalan yang timbul sebagai akibat dari pembangunan sektor wisata sehingga dapat meningkatkan baik kesejahteraan ekonomi masyarakat lokal maupun pendapatan daerah.

Daftar Pustaka

- Aref et. al. , Dimensions of Community Capacity Building: A review of its Implications in Tourism Development, Marsland Press, Journal of American Science 2010;6(1).
- Aref et. al., al, Tourism Development in Local Communities: As a Community Development Approach, Marsland Press, Journal of American Science, 2010;6(1).

- Aref et. al. , Community Capacity Building for Tourism Development, *Journal of Human Ecology*, 27(1): 21-25 (2009), University Putra, Malaysia.
- Asbullah, Alvan Sidiq et. al. , Eco-Homestay: Development Concept On Rural Tourism-Based Conservation Model (Study Case of Sidomulyo Village, Silo District, Jember Regency), *Journal of Indonesian Tourism and Development Studies*, Vol. 1 No. 3 Edisi September 2014, Website: jitode.ub.ac.id
- Edgel, David L, 1990, *International Tourism Policy*, Van Nostrand Reinhold, New York.
- Eko Suryanti et.al., Culture Development Planning in the Special Region of Yogyakarta (Management lanning of Cultural Heritage in Kotagede District based on Community Empowerment Conservation Model), *Journal of Indonesian Tourism and Development Studies*, Vol. 2 No. 3, September 2014, Website: jitode.ub.ac.id
- Hastosaptyadhan, R. Restama Gustar, *Komunikasi Partisipatif Kelompok Sadar Wisata dalam Pengelolaan Wisata Gunung Api Purba Nglanggeran, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Tesis Master Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor Bogor, 2016
- Mbaiwa, Joseph E. et. al. , Changes in resident attitudes towards tourism development and conservation in the Okavango Delta, Botswana, Harry Oppenheimer Okavango Research Centre, University of Botswana, 285, Maun, Botswana, 2011 <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2011.03.009>.
- Nisa, Ayu Raisa Khairun et. al., Agroedutourism and Ecopreneurship Activities on the Organic Farming Practices in Lawang, Malang Regency, East Java, Indonesia, *Journal of Indonesian Tourism and Development Studies*, Vol. 2 No. 3, September 2014, Website: jitode.ub.ac.id
- Susanti, Apriliana , *Pariwisata Berbasis Masyarakat di Nglanggeran : Pemberdayaan Warga untuk Pariwisata yang Berkelanjutan*. lihat <http://www.kombinasi.net/pariwisata-berbasis-masyarakat-di-nglanggeran-pemberdayaan-warga-untuk-pariwisata-yang-berkelanjutan/> diakses 9 Agustus 2017
- Sutawa, Gusti Kade, *Issues on Bali Tourism Development and Community Empowerment to Support Sustainable Tourism Development*, *Procedia Economics and Finance*, Volume 4, 2012, Pages 413-422, Elsevier, [https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(12\)00356](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(12)00356) juga dapat diakses di : <http://www.sciencedirect.com/science/journal/22125671/4/sup/c>
- Tosun, Cevat. , Expected nature of community participation in tourism development, *Tourism Management*, <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2004.12.004>. Juga dapat diakses di : <http://www.sciencedirect.com/science/journal/02615177/27/3>
- Tosun, Cevat. , *Stages in the emergence of a participatory tourism development*

approach in the Developing World, *Geoforum*, Volume 36, Issue 3, May 2005, Pages 333–352, <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2004.06.003>. juga dapat diakses di : <http://www.sciencedirect.com/science/journal/00167185/76/3>

Shone, Michael C. et. al. , *Tourism, Public Policy and Regional Development: A Turn from Neo- liberalism to the New Regionalism*, Published online: 28 Oct 2008, <http://www.tandfonline.com/action/showcitformats?doi=10.1080/2690940802408011>

Vanhove, Norbert, 2005, *The Economics of Tourism Destinations*, Amsterdam Boston Heidelberg London New York Oxford Paris San Diego San Francisco Singapore Sydney Tokyo.

